



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRI YOGYASWARI**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **682911**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **4.067.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/22 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/130 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 575.000.000
4. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 660.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.975.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **43.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI ADDRESS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR 150 REPSOL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **40.250.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **218.263.676**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **4.368.513.676**



III. HUTANG

Rp. 1.047.499.648

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.321.014.028

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.